



## Komunikasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Implementasi Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Bandung

**Soleh Hadisutisna<sup>1</sup>**

Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Wiralodra Indramayu  
[soleh\\_fisip@unwir.ac.id](mailto:soleh_fisip@unwir.ac.id)

**Nantia Rena Dewi Munggaran<sup>2</sup>**

Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Langlangbuana Bandung  
[nantiavenus@unla.ac.id](mailto:nantiavenus@unla.ac.id)

**Akhmad Basuni<sup>3</sup>**

Prodi Ilmu Komunikasi Fikom Universitas Subang  
[akhmadbasuni@unsub.ac.id](mailto:akhmadbasuni@unsub.ac.id)

### **Abstrak**

Pengelolaan sampah menjadi tantangan besar di wilayah urban Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung. Masalah persampahan menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pelayanan persampahan merupakan tugas Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan anggaran yang tidak semua pembiayaannya dapat didanai oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi masyarakat diperlukan dalam pembiayaan pengelolaan sampah ini melalui pembayaran retribusi pelayanan persampahan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah dan masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi retribusi pelayanan persampahan. Menggunakan pendekatan sosiologi komunikasi dan metode analisis kualitatif terhadap dokumen *Background Study* Peraturan Bupati No. 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, artikel ini mengkaji peran komunikasi dalam memediasi kepentingan negara dan warga. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berbasis edukasi menjadi kunci dalam membangun legitimasi dan kepatuhan warga terhadap kebijakan retribusi sampah.

**Kata Kunci:** komunikasi kebijakan, retribusi sampah

### **Abstract**

*Waste management is a major challenge in urban areas in Indonesia, including Bandung Regency. Waste management is a shared responsibility of all levels of society and the local government. Waste management services are a regional government responsibility, and their implementation requires costs and budgets, not all of which can be funded by the local government. Public contributions are essential to financing waste management through the payment of waste service fees. This study aims to analyze how policy communication between local governments and the public influences the successful implementation of waste service fees. Using a sociology of communication approach and qualitative analysis methods, this article examines the role of communication in mediating the interests of the state and citizens.*



*The study's results indicate that participatory, adaptive, and education-based communication is key to building legitimacy and citizen compliance with waste levy policies.*

**Keywords:** *policy communication, garbage collection fees*

## **Pendahuluan**

Pengelolaan sampah merupakan isu kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis dan lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial dan komunikasi. Kabupaten Bandung menghadapi tantangan meningkatnya volume dan diversifikasi sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah menetapkan kebijakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan melalui Peraturan Bupati Bandung No. 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, melainkan oleh bagaimana regulasi tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan memainkan peran penting sebagai mekanisme mediasi antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan, yakni masyarakat. Studi ini berangkat dari asumsi bahwa efektivitas kebijakan retribusi sangat bergantung pada keberhasilan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam kerangka sosiologi komunikasi, komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran informasi, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang membentuk struktur dan relasi dalam masyarakat. Berger dan Luckmann (dalam Karman, 2015) menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui konstruksi intersubjektif yang diciptakan dalam interaksi sehari-hari, termasuk dalam konteks kebijakan publik. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan bukan sekadar persoalan teknis penyampaian pesan, melainkan sebuah praktik sosial yang merefleksikan dinamika kekuasaan, makna, dan partisipasi dalam masyarakat.

Konsep komunikasi kebijakan publik menjadi sangat penting dalam menjembatani antara pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pihak penerima. Dunn menekankan bahwa proses komunikasi kebijakan yang baik ditandai dengan adanya umpan balik yang terbuka dan mekanisme komunikasi dua arah yang efektif. Dalam situasi kebijakan yang bersifat regulatif seperti retribusi sampah, kemampuan pemerintah dalam menyampaikan, menjelaskan, dan membangun dialog dengan masyarakat merupakan kunci bagi terciptanya legitimasi dan kepatuhan (Dunn, 2017).

Perspektif partisipasi publik memperkuat pentingnya keterlibatan warga dalam proses kebijakan. Habermas, melalui teori tindakan komunikatifnya menyebut bahwa ruang publik yang deliberatif adalah medium yang ideal untuk merumuskan konsensus sosial. Dalam ruang tersebut, warga dapat mendiskusikan kebijakan secara rasional dan setara, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kehendak kolektif, bukan semata-mata produk kekuasaan negara (Habermas, 1991). Oleh karena itu, dalam implementasi retribusi kebersihan di Kabupaten Bandung, pendekatan yang mengedepankan komunikasi dialogis dan partisipatif sangat relevan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial.

## Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi terhadap dokumen akademik "*Background Study* Peraturan Bupati Bandung No. 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah yang disusun oleh Konsultan IDSRF dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Pendekatan sosiologi komunikasi digunakan untuk menafsirkan dinamika interaksi antara aktor kebijakan dan masyarakat dalam proses komunikasi kebijakan.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan peran semua stakeholders sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Peraturan Bupati Bandung tentang Tarif dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan sampah merupakan wujud dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan sampah serta bentuk tanggungjawab pelaksanaan wajib layanan dasar/kesehatan/kebersihan kepada masyarakat. Peraturan Bupati tentang Tarif dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Sampah membantu daerah untuk memiliki regulasi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting karena biaya investasi, operasional dalam pengelolaan sampah cukup tinggi dan perlu juga kontribusi masyarakat selain dana alokasi pemerintah Retribusi daerah merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab dan memberi ruang bagi daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang mengatur penerimaan daerah di bidang pengelolaan persampahan sehingga terwujud kemandirian daerah dalam pembiayaan pengelolaan persampahan.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung terjadi dalam konteks sosial yang kompleks, ditandai oleh pertumbuhan penduduk, ekspansi wilayah perkotaan, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang menghasilkan peningkatan volume sampah. Sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan metode konvensional seperti kumpul-angkut-buang mencerminkan minimnya transformasi struktural dan kultural dalam cara pandang masyarakat terhadap isu persampahan. Ketimpangan antara peningkatan produksi sampah dan kapasitas penanganannya menjadi latar belakang kuat bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan retribusi pelayanan persampahan sebagai upaya memperbaiki kualitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Peraturan Bupati Bandung No. 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah hadir sebagai instrumen regulatif untuk menjawab persoalan tersebut. Namun, secara sosiologis, keberhasilan implementasi peraturan ini sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat. Studi ini menemukan bahwa komunikasi satu arah yang menitikberatkan pada aspek instruksi dan kewajiban, tanpa disertai upaya membangun pemahaman dan dialog, tidak cukup untuk mendorong partisipasi warga. Minimnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap mekanisme dan manfaat retribusi, yang pada gilirannya memunculkan resistensi sosial dalam bentuk penolakan atau ketidakpedulian.

Persepsi masyarakat terhadap retribusi sangat bergantung pada pengalaman langsung dan representasi simbolik yang mereka pahami. Jika masyarakat tidak melihat keterkaitan langsung antara kontribusi finansial mereka dan perbaikan layanan kebersihan, maka yang muncul adalah rasa ketidakadilan. Dalam banyak kasus, retribusi dipersepsikan sebagai beban tambahan, bukan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Ketidakjelasan dalam komunikasi, baik dari sisi bahasa maupun media yang digunakan, memperparah situasi tersebut. Dalam hal ini, komunikasi kebijakan seharusnya mampu menjembatani kesenjangan makna antara negara dan warga, serta mentransformasikan kewajiban menjadi bentuk partisipasi sosial yang bermakna.

Peran media menjadi sangat strategis dalam memperkuat komunikasi kebijakan. Namun sayangnya, media lokal dan digital di Kabupaten Bandung belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi media sosial untuk menyampaikan informasi secara cepat dan membangun komunikasi dua arah belum digunakan secara sistematis dalam kampanye kebijakan retribusi. Padahal, dengan konten yang dirancang secara naratif dan visual, serta dengan pelibatan tokoh masyarakat sebagai komunikator kredibel, media dapat menjadi sarana edukasi yang efektif sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks edukasi, strategi komunikasi kebijakan perlu lebih dari sekadar penyuluhan birokratis. Edukasi yang berhasil adalah yang mampu menjangkau kesadaran budaya masyarakat melalui pendekatan yang kontekstual, seperti penggunaan bahasa lokal, narasi keseharian, dan bentuk komunikasi yang bersifat partisipatif. Warga perlu diberdayakan sebagai aktor komunikasi, bukan hanya sebagai objek informasi. Ketika mereka terlibat dalam proses produksi dan penyebaran makna, maka kebijakan retribusi akan lebih mudah diterima karena telah menjadi bagian dari kesepakatan sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pentingnya transformasi strategi komunikasi kebijakan dari pendekatan yang otoritatif menjadi pendekatan yang dialogis dan edukatif. Komunikasi harus menjadi ruang pertemuan makna antara pemerintah dan warga, agar kebijakan retribusi sampah tidak sekadar menjadi dokumen legal, tetapi juga menjadi kesepahaman sosial yang dibangun bersama. Berikut adalah hal-hal yang menjadi permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung:

1. Konteks Sosial Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi telah meningkatkan volume sampah rumah tangga dan sampah sejenis lainnya. Sistem pengelolaan yang masih konvensional (kumpul-angkut-buang) mencerminkan kurangnya pendekatan edukatif dalam mengubah perilaku masyarakat. Isu-isu seperti minimnya fasilitas pengelolaan, rendahnya kesadaran publik, dan keterbatasan pembiayaan menjadi latar belakang yang memperkuat kebutuhan akan kebijakan yang berkeadilan dan komunikatif.

2. Komunikasi Kebijakan dalam Implementasi Retribusi

Peraturan Bupati No. 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah secara hukum telah memenuhi kaidah formal, namun dari aspek komunikasi, masih terdapat tantangan besar. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar retribusi disebabkan oleh minimnya sosialisasi. Komunikasi satu arah yang menekankan pada instruksi dan kewajiban

tidak cukup untuk membangun kesadaran dan keterlibatan. Dalam studi ini, kebijakan yang tidak disertai proses komunikasi yang dialogis dan partisipatif cenderung menimbulkan resistensi sosial. Hal ini selaras dengan pandangan Habermas tentang pentingnya diskursus sebagai proses penciptaan makna bersama dalam ruang publik.

Komunikasi yang efektif dalam konteks kebijakan retribusi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat. Pemerintah perlu membangun kepercayaan melalui transparansi dalam perhitungan tarif, manfaat layanan yang diberikan, dan pelibatan warga dalam evaluasi kebijakan. Ketika masyarakat tidak melihat nilai dari kontribusi finansialnya, maka legitimasi kebijakan pun melemah.

### 3. Persepsi dan Respons Masyarakat

Berdasarkan data lapangan yang tercantum dalam *background study*, banyak warga yang belum memahami mekanisme penghitungan retribusi, serta belum melihat manfaat langsung dari layanan kebersihan. Ketidakjelasan informasi dan kurangnya media komunikasi partisipatif menyebabkan resistensi sosial. Dalam perspektif sosiologi komunikasi, persepsi masyarakat dibentuk oleh interaksi simbolik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika simbol-simbol yang diasosiasikan dengan kebijakan—seperti tagihan retribusi atau truk pengangkut sampah—tidak diasosiasikan dengan manfaat nyata, maka akan timbul sikap skeptis atau bahkan apatis.

Warga cenderung merespons kebijakan berdasarkan pengalaman langsung dan informasi yang mereka anggap kredibel. Oleh karena itu, diperlukan figur atau institusi yang dipercaya masyarakat (seperti tokoh agama, RT/RW, atau komunitas lokal) untuk menjadi *corong* komunikasi pemerintah.

### 4. Peran Media dan Teknologi

Media lokal dan digital masih belum dimaksimalkan untuk mendukung komunikasi kebijakan. Padahal, pendekatan multi-kanal dan penggunaan media sosial sangat potensial untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda. Media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, umpan balik langsung, dan penyebaran informasi yang cepat.

Namun demikian, efektivitas media tergantung pada konten yang disajikan. Pesan kebijakan perlu dikemas secara visual, naratif, dan emosional agar mampu menarik perhatian masyarakat. Kampanye digital yang didesain dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pengguna lokal akan memperbesar peluang keberhasilan komunikasi kebijakan.

### 5. Strategi Komunikasi Berbasis Edukasi

Pendekatan edukatif dengan pelibatan tokoh masyarakat, penyuluhan berbasis komunitas, serta penyebaran informasi dalam bahasa yang mudah dipahami merupakan kebutuhan utama. Kegagalan memahami konteks sosiokultural masyarakat akan berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan. Program edukasi yang hanya bersifat formal dan birokratis seringkali tidak menyentuh kebutuhan dan bahasa warga. Maka, penting untuk mengembangkan materi edukasi dalam bentuk yang lebih inklusif dan menarik: drama lokal, infografik, *podcast*, atau lokakarya interaktif.

Strategi komunikasi yang berhasil bukan hanya yang informatif, tetapi juga transformatif. Artinya, komunikasi kebijakan perlu mendorong perubahan sikap, nilai, dan tindakan sosial. Dalam hal ini, integrasi antara pendekatan struktural (peraturan dan sistem) dan pendekatan kultural (norma dan nilai masyarakat) menjadi sangat penting.

### Simpulan

Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang lebih berorientasi pada keadilan sehingga dapat terwujud kemandirian daerah dalam pengelolaan persampahan/kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas implementasi kebijakan retribusi pelayanan kebersihan di Kabupaten Bandung sangat ditentukan oleh strategi komunikasi yang digunakan. Komunikasi yang terbuka, dialogis, dan edukatif dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan masyarakat. Dalam konteks sosiologi komunikasi, kebijakan publik harus dibangun sebagai hasil dialog antara negara dan warga, bukan sekadar produk normatif yang memaksa.

Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan retribusi tidak hanya terletak pada legalitas dan logika administratifnya, tetapi juga pada bagaimana masyarakat merespons dan memaknainya. Pendekatan sosiologi komunikasi memberi pemahaman bahwa komunikasi kebijakan bukan sekadar proses penyampaian informasi, melainkan proses penciptaan makna bersama antara aktor kebijakan dan warga. Jika pemerintah dapat memfasilitasi proses ini secara efektif, maka akan tercipta legitimasi yang kuat dan dukungan sosial yang luas.

### Rekomendasi

Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang partisipatif, menggunakan berbagai media dan pendekatan lokal. Pendekatan ini harus berbasis pada segmentasi audiens dan kondisi sosial-budaya masyarakat di setiap wilayah pelayanan. Karenanya dibutuhkan pelatihan komunikasi publik bagi aparat pelaksana kebijakan agar mampu menjadi jembatan antara negara dan warga. Aparat tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan keluhan dan masukan masyarakat secara aktif. Pemerintah juga perlu membangun saluran komunikasi dua arah, seperti forum warga, lokakarya komunitas, dan media digital interaktif, yang dapat menjadi ruang partisipasi dan edukasi warga secara berkelanjutan. Di samping itu, materi komunikasi perlu disesuaikan dengan literasi masyarakat, baik dari segi bahasa, medium, maupun narasi. Penggunaan bahasa lokal, cerita rakyat, atau pendekatan visual bisa menjadi alat edukasi yang lebih efektif. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan perspektif warga secara langsung untuk mengukur persepsi dan efektivitas pesan kebijakan. Metode partisipatif seperti *photovoice*, FGD komunitas, dan studi etnografi dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman sosial atas komunikasi kebijakan.

### Referensi

Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis An Integrated Approach* (6th Editio). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315181226>



Habermas, J. (1991). *Communicative Action, Essays on Jurgen Habermas's The Theory of Communicative Action* (H. J. Honneth, Axel (ed.); First MIT). The MIT Press.

Karman, Karman (2015). Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger). In *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika* (Vol. 5). <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/jppki/article/view/600/381>

Laporan Background Study IDSRF-DLH Kabupaten Bandung (2025).

Peraturan Bupati Nomor 288 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Perda Kab Bandung No 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.